

KAJIAN DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT DENGAN TINGKAT PENDAPATAN KELUARGA DI KABUPATEN SUMENEP

Alwiyah^{*)} dan Dyah Harilistyorini^{**)}

Fakultas Ekonomi, Universitas Wiraraja Sumenep^{*)}

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep^{**)}

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat pada berbagai tingkat pendapatan keluarga di Kabupaten Sumenep. Dengan menggunakan analisis deskriptif yang menghubungkan tingkat pendapatan masyarakat dengan pola konsumsi pangan (dalam PPH), maka dapat disimpulkan bahwa faktor rendahnya tingkat pendapatan masyarakat memberikan kontribusi besar terhadap rendahnya skor PPH. Skor PPH yang rendah sangat mendominasi pada setiap kelompok pendapatan, meskipun mempunyai kecenderungan penurunan persentasenya dengan adanya kenaikan pendapatan keluarga pada kelompok tingkat pendapatan yang tinggi (diatas 1,5 juta per bulan), persentase skor PPH rendah (< 60,9) masih paling tinggi dibandingkan kelompok skor PPH di atasnya, meskipun perbedaannya tidak begitu signifikan. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya banyak hal yang dapat mempengaruhi pola konsumsi pangan masyarakat.

Kata kunci: diversifikasi, konsumsi pangan, tingkat pendapatan keluarga

I. PENDAHULUAN

Pemenuhan akan kebutuhan pangan merupakan salah satu hak dasar bagi setiap individu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dinyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang No 7 tahun 1996 juga dituangkan tentang Ketahanan Pangan yang secara terperinci diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

Alamat Korespondensi:

Alwiyah, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Wiraraja Sumenep. Jl. Raya Sumenep-Pamekasan Km. 5 Patian-Sumenep.

Dyah Harilistyorini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep. Jl. Manikam No.29 A Sumenep.

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pemerataan pangan menyangkut merata antar daerah/wilayah, antar rumah tangga dan sepanjang waktu/musim.

Tahun 2025, diperkirakan Indonesia akan mengalami krisis pangan. Krisis ini terjadi karena berkurangnya lahan pertanian sementara konsumsi masyarakat akan pangan cukup tinggi (Tineke Mandang, 2009). Tidak bisa dipungkiri, pertumbuhan laju penduduk tidak sejalan dengan peningkatan produksi bahan pangan khususnya komoditas beras. Seiring dengan proses pembangunan, banyak lahan sawah yang beralih fungsi dan daya dukung kualitas lahan yang menurun. Solusinya adalah penganekaragaman pangan atau diversifikasi pangan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penganeekaragaman konsumsi pangan atau diversifikasi konsumsi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya untuk mengatasi masalah pangan dan gizi. Dari berbagai jenis pangan yang ada, tidak ada satupun jenis pangan yang lengkap gizinya kecuali ASI (Martianto, 2005). Fakta tersebut menunjukkan bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan bagi masyarakat merupakan aspek penting bagi perwujudan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas.

Secara nasional, untuk mengukur bagaimana kondisi diversifikasi konsumsi pangan masyarakat, yang dinyatakan sebagai keragaman pangan yang dikonsumsi, dapat diukur dengan apa yang disebut dengan Pola Pangan Harapan (PPH). Dengan PPH, tingkat kualitas keanekaragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat sekaligus bagaimana gambaran tingkat pemenuhan gizi yang diperlukan sehari-hari dapat diidentifikasi yang dinyatakan dalam bentuk skor pangan. Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya yang selanjutnya akan tercipta gizi yang seimbang (Hardinsyah, 1996).

Sesuai dengan target nasional yang diakomodir pula di tingkat Provinsi Jawa Timur, PPH diharapkan mempunyai skor mendekati ideal (skor ideal 100) pada tahun 2020. Dengan perolehan skor PPH 71,7 tentunya menjadi suatu tugas berat bagi Kabupaten Sumenep untuk mengejar ketertinggalannya.

Bahkan melalui Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Jawa Timur, setiap wilayah kabupaten/kota diharapkan mengambil langkah untuk melakukan percepatan keanekaragaman pangan di wilayahnya masing-masing dengan target skor PPH 95 pada tahun 2015.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat pada berbagai tingkat pendapatan keluarga di Kabupaten Sumenep. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Sumenep, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan ketahanan pangan di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun di tingkat nasional.

II. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ditentukan dengan *purposive sampling*, yaitu di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sumenep. Pengambilan sampel menggunakan metode *Cluster Sampling*, yaitu pengambilan contoh berdasarkan area atau cluster. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian sebanyak 20% dari jumlah desa di setiap kecamatan, sehingga diperoleh sebanyak 78 desa.

Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sumenep. Untuk ukuran sampel dipilih sebanyak 5 rumah tangga di setiap desa di Kabupaten Sumenep, sehingga diperoleh sampel sebanyak 390 rumah tangga.

Sampel dibagi menjadi 4 (empat) kelompok berdasarkan pada tingkat pendapatan keluarga. Dari jumlah sampel yang ada: 191 (49%) rumah tangga mempunyai pendapatan dibawah 500.000/ bln, 128 (33%) rumah tangga dengan pendapatan 500.000 – 999.999/bln, 43 (11%) rumah tangga dengan pendapatan 1 jt – 1,5 jt per bulan, dan 28 (7%) rumah tangga mempunyai tingkat pendapatan diatas 1,5 juta per bulan.

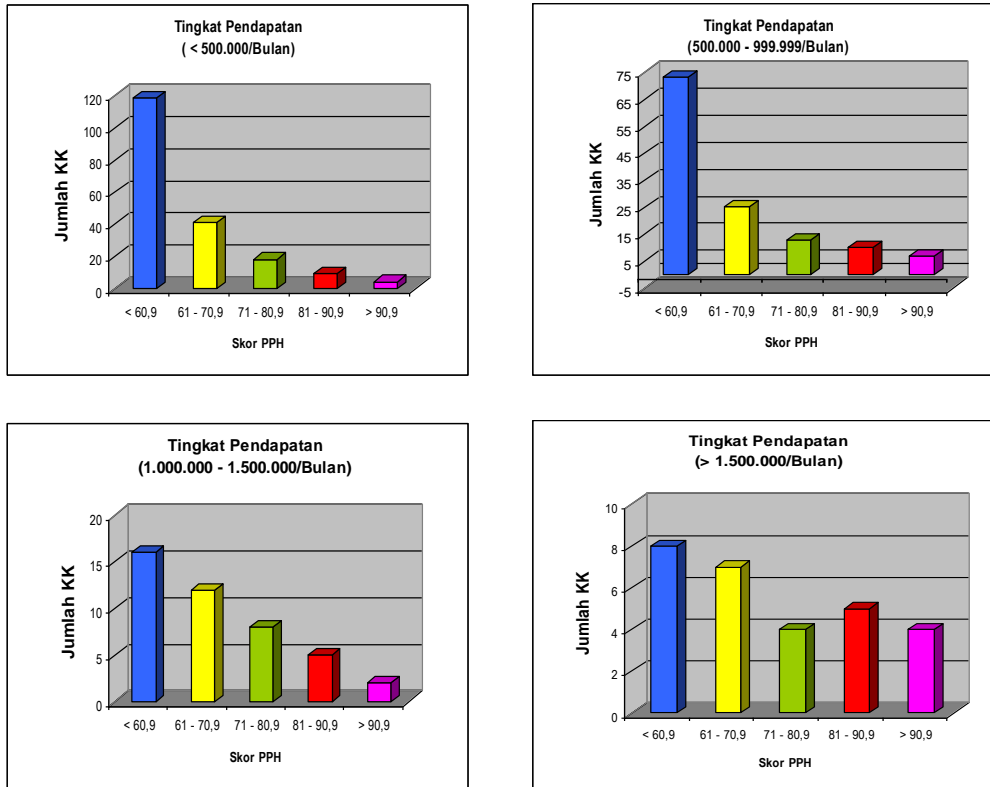
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data jumlah pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat selama kurun waktu 24 jam (*recall 24 jam*). Pengumpulan data konsumsi pangan dilakukan melalui kuesioner yang mengacu pada *form questionnaire* dari Departemen Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Untuk mendapatkan pola konsumsi pangan (dalam PPH), digunakan analisis

deskriptif yang menghubungkan tingkat pendapatan masyarakat dengan pola konsumsi pangan (dalam PPH).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masing-masing kelompok pendapatan, sampel dikelompokkan berdasar pada skor PPH-nya. Skor PPH dibagi dalam 5 (lima) kelompok yaitu: < 60,9; 61-70,9; 71-80,9; 81-90,9; > 90,9. Secara terperinci, skor PPH rumah tangga pada masing-masing tingkat pendapatan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Skor PPH dan Tingkat Pendapatan Keluarga

Pada tingkat pendapatan terendah, kurang dari 500.000/bulan, jumlah rumah tangga dengan skor PPH rendah mencapai 62%, sangat jauh jika dibandingkan dengan rumah tangga yang skor PPH-nya tinggi (> 90,9) yaitu hanya 2%. Kecenderungan ini masih nampak pada tingkat pendapatan dibawah 1 juta per bulan dimana persentase rumah tangga dengan skor PPH rendah masih mencapai 57%. Pada tingkat pendapatan di atas 1 juta per bulan, dominasi skor PPH rendah menurun, meskipun persentasenya masih paling besar .

Perbedaan tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Sumenep dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, dimana dengan adanya perbedaan tersebut masyarakat menuntut kuantitas dan kualitas (mutu) pangan yang berbeda-beda pula. Pendapatan rumahtangga/keluarga merupakan faktor utama yang menentukan pola konsumsi pangan dan diversifikasi pangan. Konsumsi pangan pokok berbeda antar rumah tangga tergantung dari tinggi rendahnya tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga, umumnya konsumsi akan semakin meningkat. Akan

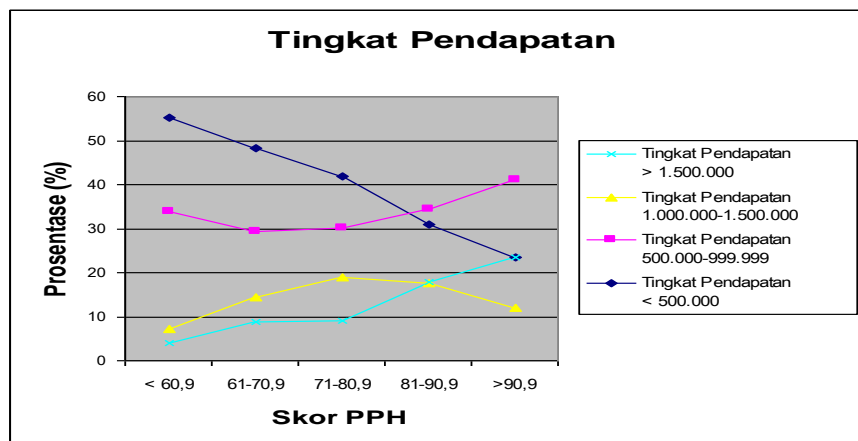
tetapi, besarnya peningkatan pendapatan tidak selalu sama besar dengan peningkatan konsumsi. Secara umum dengan adanya peningkatan pendapatan akan memberi peluang bagi masing-masing rumah tangga untuk melakukan diversifikasi konsumsi untuk meningkatkan kualitas pangan dalam upaya meningkatkan gizi keluarganya.

Tingkat keragaman konsumsi pangan di Kabupaten Sumenep juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, status dan pekerjaan, keterlibatan keluarga dalam kegiatan sosial, dan sebagainya. Tingkat pendidikan berpengaruh cukup signifikan dalam melihat pola konsumsi pangan di Kabupaten sumenep,

karena pada umumnya masyarakat kurang begitu memperhatikan kandungan gizi yang ada pada pangan yang dikonsumsi.

Status dan pekerjaan juga berpengaruh terhadap pola konsumsi pangan, karena berhubungan dengan tingkat pendapatan yang diterima. Sedangkan keterlibatan keluarga dalam kegiatan sosial berhubungan dengan informasi yang diterima oleh rumah tangga tentang pengetahuan-pengetahuan dalam bidang pangan.

Dari hasil survei, diperoleh gambaran bagaimana skor PPH masyarakat Kabupaten Sumenep pada berbagai tingkat pendapatan (Gambar 2).



Gambar 2. Skor PPH pada Berbagai Tingkat Pendapatan Keluarga.

Secara berurutan, dominasi keluarga dengan skor PPH rendah terdapat pada keluarga dengan tingkat pendapatan yang rendah dan semakin menurun persentasenya dengan adanya kenaikan pendapatan keluarga. Pada tingkat pendapatan keluarga 500.000 – 999.999, dominasi persentase keluarga dengan skor PPH rendah semakin kecil, dan bahkan bergeser menjadi persentase yang paling kecil dengan semakin bertambahnya pendapatan keluarga.

Pendapatan merupakan determinan yang dikenal luas dalam model perilaku konsumen, dan juga termasuk dalam model penawaran pangan. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka akan semakin tinggi pula pendapatan yang dialokasikan untuk pangan

(biaya pangan). Semakin tinggi alokasi pendapatan untuk pangan maka akan semakin tinggi daya beli pangan yang pada akhirnya akan meningkatkan keragaman konsumsi pangan. Pandangan umum mengenai hubungan antara pendapatan dan keragaman konsumsi pangan berasal dari bukti empiris umum bahwa ada perbedaan pola konsumsi pangan pada kelompok masyarakat menengah ke atas dan menengah ke bawah. Umumnya pola konsumsi pangan kelompok menengah ke bawah lebih sederhana dimana mereka lebih mengutamakan mengonsumsi sumber kalori yang murah (bahan pangan pokok), sedangkan pada kelompok menengah ke atas pola konsumsi pangannya lebih beragam dengan lebih banyak mengonsumsi pangan

sumber protein dan vitamin.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Sumenep masih belum optimal, yang dicirikan dengan skor PPH yang belum sesuai dengan harapan. Skor PPH ideal adalah 100. Sedangkan berdasarkan survei konsumsi pangan tahun 2008, PPH Kabupaten Sumenep baru sebesar 71,7. Faktor rendahnya tingkat pendapatan masyarakat memberikan kontribusi besar pada rendahnya Skor PPH. Dari hasil analisa, skor PPH yang rendah sangat mendominasi pada setiap kelompok pendapatan, meskipun mempunyai kecenderungan penurunan prosentasenya dengan adanya kenaikan pendapatan keluarga.

Pada kelompok tingkat pendapatan yang tinggi (diatas 1,5 juta per bulan), prosentase skor PPH rendah (< 60,9) masih paling tinggi dibandingkan kelompok skor PPH di atasnya, meskipun perbedaannya tidak begitu signifikan. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya banyak hal yang dapat mempengaruhi pola konsumsi pangan masyarakat.

4.2. Saran

1. Perbaiki pola konsumsi masyarakat akan lebih bermanfaat apabila diberikan dalam bentuk stimulan yang dapat memberikan daya akses berupa bantuan modal usaha daripada bantuan yang bersifat instan.
2. Sosialisasi tentang diversifikasi konsumsi pangan baik vertikal maupun horizontal secara kontinyu dan terpadu.
3. Sebagai upaya untuk meningkatkan diversifikasi konsumsi pangan masyarakat perlu adanya pemantapan ketahanan pangan dengan tidak menyediakan pangan murah tetapi perlu dilakukan berbagai

program yang sifatnya meningkatkan daya beli masyarakat terhadap pangan

4. Perlu dilaksanakan internalisasi diversifikasi konsumsi pangan dalam dunia pendidikan sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- BKP Provinsi Jawa Timur. 2005. *Kajian Standar Kecukupan Pangan Tingkat Rumah Tangga pada Agroekologi yang Berbeda*. IPB. Bogor.
- _____. 2005. *Kajian Diversifikasi Pola Konsumsi Pangan di Daerah Rawan Pangan Berdasarkan Klasifikasi Fungsional*. UNEJ. Jember.
- Hanani, Nuhfil, A.R. 2009. *Diversifikasi Konsumsi Pangan*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Hardinsyah. 2007. *Review Faktor Determinan Keragaman Konsumsi Pangan*. Jurnal Gizi dan Pangan, ed. Juli.
- Krisnamukti, Bayu. 2003. *Penganekaragaman: Pengalaman 40 Tahun dan Tantangan Ke Depan*. Bogor.
- Lassa, Jonatan. 2005. *Politik Ketahanan Pangan Indonesia. 1952-2005*.
- Simatupang, Pantjar. 2007. *Analisis Kritis terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol 25 No. 1 Juli.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Susastiri, N.M.Y.P. 2008. *Diversifikasi Konsumsi Pangan Pokok Berbasis Potensi Lokal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah tangga Pedesaan Di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 13 No. 1 April.